

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN
CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI**

Dede Rizal Kurniawan

Email : dederizalkurniawan@stisipwidyapuri-smi.ac.id
STISIP Widyapuri Mandiri

ABSTRACT

Implementation of the Social Rehabilitation Policy for Uninhabitable Houses is a process of restoring the social functioning of the poor through efforts to improve the condition of uninhabitable houses, either partially or completely, which are carried out in mutual cooperation so as to create conditions for proper housing as a place to live. This study aims 1. To find out the communication built in the Implementation of the Policy for the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Sukamanah Village, Cimanggu District, Sukabumi Regency 2. To find out the resources related to the Implementation of the Policy for the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS - RTLH) in Sukamanah Village, Cimanggu District, Sukabumi Regency 3. To find out the attitude of the implementers of the Policy Implementation of the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) in Sukamanah Village, Cimanggu District, Sukabumi Regency 4. To find out the Bureaucratic Structure related to the Implementation of the Social Rehabilitation Program Policy Uninhabitable House (RS-RTLH) in Sukamanah Village, Cimanggu District, Sukabumi Regency. This study uses Edward III's theory in Subarsono (2015:90-92) which includes four dimensions, namely: 1. Communication, 2. Resources, 3. Disposition and 4. Bureaucratic Structure.

The approach used in this study is a qualitative approach using descriptive methods. Data collection techniques using observation techniques, interviews, documentation, and applying triangulation techniques. With the tools that are interview guides, observation guides, field notes, recordings, and cameras. Then analyze the data by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This research was conducted in Sukamanah Village, Cimanggu District, Sukabumi Regency. The number of informants in this study were six people, namely the Head of Sukamanah Village, Secretary, Head of Hamlet, LPM, and two Beneficiary Families (KPM). with informant settings used are purposive sampling and snowball sampling.

Based on the results of the study, the implementation of the social rehabilitation policy for uninhabitable houses in Sukamanah Village, Cimanggu District, Sukabumi Regency is not yet optimal, but it will be optimal if the factors are optimally increased so that with this policy it can create livable houses in Sukamanah Village.

Keywords: Implementation, Policy, RS-RTLH

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Penelitian ini

bertujuan 1. Untuk mengetahui komunikasi yang dibangun dalam Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi 2. Untuk mengetahui Sumber daya terkait Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi 3. Untuk mengetahui sikap para pelaksana Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi 4. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi terkait Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dalam Subarsono (2015:90-92) yang meliputi empat dimensi yakni : 1. Komunikasi, 2. Sumberdaya, 3. Disposisi dan 4. Struktur Birokrasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi ,serta menerapkan teknik triangulasi. Dengan alat bantu yakni pedoman wawancara, panduan observasi, catatan lapangan, rekaman, dan kamera. Kemudian analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah enam orang yakni Kepala Desa Sukamanah, Sekretaris, Kepala Dusun, LPM, dan dua Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan setting informan yang digunakan adalah *purposive sampling dan snowball sampling*.

Berdasarkan hasil Penelitian bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi belum optimal, namun akan optimal bila faktor-faktor ditingkatkan optimalnya sehingga dengan adanya kebijakan ini dapat mewujudkan rumah layak huni di Desa Sukamanah.

Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, RS-RTLH

Submitted: 31-08-2025 | Accepted: 31-08-2025 | Published: 31-08-2025

1. Pendahuluan

Rumah Tidak Layak Huni yang disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sedangkan Rumah Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RULAHU adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

RS-RTLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Sasaran penerima bantuan sosial program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah masyarakat/keluarga miskin di wilayah Kabupaten Sukabumi yang menempati rumah tidak layak huni, salah satunya yaitu di Desa sukamanah Kecamatan Cimanggu.

Adapun sumber dana untuk Program RS-RTLH yaitu dana APBD Kabupaten Sukabumi, dengan menggali sumber-sumber lainnya dari swadaya masyarakat, partisipasi dunia usaha dan sumber yang tidak mengikat. Dan penyalurannya melalui dinas sosial kabupaten Sukabumi tahun 2019 dan dinas perumahan dan permukiman kabupaten Sukabumi tahun 2020.

Kesuksesan suatu kebijakan publik tidak hanya dapat dilihat dari kebijakan tersebut diimplementasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Namun perlu dilihat juga respons masyarakat terhadap suatu kebijakan yang diterimanya.

Menurut Edward III dalam Subarsono (2015:90-92), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pra-observasi yang telah dilakukan di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi terdapat beberapa permasalahan:

1. Kurangnya komunikasi, bisa terlihat dari penyaluran, kejelasan dan media informasi dalam sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat kepada masyarakat terkait Program bantuan RS-RTLH/RTLH.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait program RS-RTLH serta pengalokasian anggaran yang belum optimal.
3. Belum optimalnya arahan dan tanggapan serta pemahaman yang baik dari pelaksana terhadap program RS-RTLH, dan ketidaktepatan pelaksanaan pembangunan yang belum maksimal.
4. Kurang efektifnya *Standar Operating Procedures* (SOP) dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan program bantuan RS- RTLH/RTLH.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan judul **"Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi"**.

2. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky(1978:xxi) dalam Tachjan (2006 : 24) mengemukakan bahwa: *"Implementation as to carry out,*

accomplish, fulfill, produce, complete". Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi

Sedangkan Grindle (1980:6) dalam Tachjan (2006:24-25) mengemukakan bahwa : *"Implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level"*. Artinya implementasi - proses umum tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu

Implementasi kebijakan menurut Merse dalam Tahir (2011:138-139). Implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: "Informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan pembagian potensi khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program

3. Metode Penelitian

peneliti menggunakan Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena metode deskriptif dianggap paling tepat oleh peneliti, serta penelitian deskriptif kualitatif ialah jenis penelitian yang menggambarkan serta menyebutkan permasalahan yang diteliti pada bentuk kalimat serta bukan dalam bentuk angka-angka.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Komunikasi

Penyaluran mengenai kebijakan ini telah tersampaikan dengan cukup baik, sehingga dalam penerapannya dilapangan sesuai dengan perintah dan prosedur yang ada agar berjalan secara sistematis dan terstruktur. Namun penyampaian informasi akan lebih efektif apabila penyampaian tentang pelaksanaannya dilakukan secara langsung terhadap target atau objek sasaran dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan diskusi. Namun, terdapat beberapa hambatan yang membuat penyaluran program tersebut tidak efektif diantaranya adalah respon masyarakat yang kurang serta aksesibilitas infrastruktur yang belum memadai.

Kejelasan dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tersebut haruslah jelas dan tidak membingungkan. Para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konteks kebijakan.

Kejelasan dari kebijakan ini sudah jelas, terlihat dari para pelaksana kebijakan yang memahami maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan program bantuan rumah tidak layak huni ini, akan tetapi kejelasan informasi yang di sosialisasikan oleh perangkat desa dirasa belum baik, dilihat dari respon dari masyarakat yang masih kurang karena kurangnya memahami program tersebut.

Selanjutnya media komunikasi adalah alat dalam penyampaian sebuah komunikasi. Dengan adanya media atau alat yang dapat mempermudah implementasi kebijakan. Oleh karena itu, media berperan penting dalam keberhasilan penyampaian sebuah kebijakan pada masyarakat. Peran media komunikasi berjalan dengan cukup baik, dilihat dari keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar mampu memanfaatkan media komunikasi untuk menjadi pen jembatan antara implementor dengan masyarakat. Sehingga dengan pemanfaatan media ini dapat membuat informasi dan sosialisasi mudah untuk di salurkan.

Dari ketiga indikator diatas, mengenai komunikasi terkait program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimaggu Kabupaten Sukabumi dapat disimpulkan bahwa sudah cukup baik dilihat dari hasil penelitian dengan indikator: Transmisi/Penyaluran, Kejelasan dan Media Komunikasi.

b. Sumber Daya

Berdasarkan pernyataan diatas maka sumberdaya yang dimiliki oleh jajaran pemerintahan desa Sukamanah sudah memadai dalam proses menerjemahkan kebijakan terhadap proses penyaluran program rutilahu pada masyarakat. Yang tentunya membutuhkan responsivitas dari masyarakat terkait program yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Karena peranan staf yang begitu besar hendaknya dapat memaksimalkan kinerja mereka dalam keberhasilan implementasi kebijakan program tersebut.

Serta melihat dari sumberdaya finansial sejauh ini sudah baik, karena terlihat dari dedikasi mereka yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan warga, tanpa adanya anggaran khusus bagi para pelaksana kebijakan

Dari kedua indikator diatas, mengenai sumberdaya terkait program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa Sukamanah Kecamatan Cimaggu Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sudah memadai. Dilihat dari indikator : Sumberdaya Manusia/staff dan Sumberdaya finansial

c. Disposisi

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa penunjukan dan pengangkatan staff dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan birokrasi pada implementasi kebijakan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dikatakan baik dilapangan.

Dari pernyataan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan sudah baik dan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakteristik yang penting harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Pemilihan dan pengangkatan para pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan warga.

Berdasarkan arahan dan tanggapan yang diberikan kepada perangkat desa sudah baik, pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa arahan dari para pemangku kebijakan baik dan dapat dipahami masyarakat. Responsifitas dari masyarakat terkait arahan yang dilakukan oleh pemerintah baik juga disertai dengan sikap yang ditampilkan oleh masyarakat dalam program ini. Dari ketiga indikator diatas dapat dikatakan baik dilihat dari: Pengaturan Birokrasi, Sikap Implementor dan Arahan dan Tanggapan.

d. Struktur Birokrasi

fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik dilapangan, dimana penyebaran tanggungjawab terlihat dengan jelas dilapangan. Selain itu terbentuknya struktur kepanitiaan yang membuat penyebaran tanggungjawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, pembagian peran yang telah ada setidaknya dapat mengetahui tugas dan batasan kerja mereka agar tetap berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan hasil analisis dari kedua indikator diatas maka Struktur Birokrasi terkait implementasi kebijakan sudah dikatakan baik. Dilihat dari pelaksana dan pengelola yang mengikuti SOP yang ada sebagai pedoman atau panduan serta pembagian tugas yang sudah jelas dengan tupoksinya

5. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang mengkaji Komunikasi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi terkait Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi sejauh ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa dari hasil transmisi/penyaluran komunikasi dari pihak pemerintah terkait program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni belum terlalu efektif dan baik, akan tetapi kejelasan sudah dikatakan cukup baik melihat dari berjalannya kebijakan ini. Karena dalam penerapan dilapangan sesuai dengan perintah dan prosedur yang berjalan secara sistematis dan terstruktur. Dan Peran media komunikasi berjalan dengan baik, dilihat dari keberhasilan suatu kebijakan mensyaratkan agar mampu memanfaatkan media komunikasi untuk menjadi pen jembatan antara implementor dengan masyarakat. Sehingga dengan pemanfaatan media ini dapat membuat informasi dan sosialisasi mudah untuk di salurkan
2. Berdasarkan peneliti yang mengkaji Sumberdaya, dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang memadai menjadi salah satu faktor berhasilnya sebuah implementasi kebijakan. Dalam hal ini kebijakan program bantuan rumah tidak layak huni sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sukamanah ini sudah memadai. Karena peranan staf yang begitu besar hendaknya dapat memaksimalkan kinerja mereka, serta peranan staf sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Serta melihat dari sumberdaya finansial sejauh ini sudah baik, karena terlihat dari dedikasi mereka yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan warga, tanpa adanya anggaran khusus bagi para pelaksana kebijakan. Dari kedua indikator diatas, mengenai sumberdaya terkait program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Desa

Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sudah memadai dan sudah berjalan dengan baik.

3. Berdasarkan peneliti yang mengkaji Disposisi, dapat disimpulkan bahwa disposisi Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi sudah dikatakan baik, terlihat dari kemampuan pelaksana/Implementor yang sudah memadai. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan birokrasi pada implementasi kebijakan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi dikatakan baik dilapangan. Selanjutnya yaitu Arahan dan Tanggapan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan, ataupun penolakan pelaksanaan dalam menyikapi kebijaksanaan. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa arahan dari para pemangku kebijakan baik dan dapat dipahami masyarakat. Responsifitas dari masyarakat terkait arahan yang dilakukan oleh pemerintah baik juga disertai dengan sikap yang ditampilkan oleh masyarakat dalam program ini. Dari ketiga indikator diatas dapat dikatakan baik dilihat dari : Pengaturan Birokrasi, Sikap Implementor dan Arahan dan Tanggapan.
4. Berdasarkan peneliti yang mengkaji Struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa birokrasi Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi sudah dikatakan baik, karena dengan berjalannya kebijakan sampai saat ini tetap terstruktur dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaan tidak menyimpang dari agenda dan aturan yang ada dalam *Standart Operating Prosedur* (SOP). Dan tetapi melihat dari *Fragmentasi* pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan dengan baik dilapangan, dimana penyebaran tanggung jawab terlihat dengan jelas. Selain itu terbentuknya struktur kepanitiaan yang membuat penyebaran tanggungjawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selain itu, pembagian peran yang telah ada setidaknya dapat mengetahui tugas dan batasan kerja mereka agar tetap berjalan secara sistematis dan terstruktur

Daftar Pustaka

- Abidin. 2015. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung. Alfabeta Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan publik*. Bandung. CV Pustaka Setia
- Fadjarajani, Siti. DKK . 2020. *Metodelogi penelitian. Pendekatan multidisipliner*. Gorontalo. Ideas Publishing
- Moleng. 2007. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Mulyadi. 2016. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung. Alfa Beta Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta. PT Leutika Nouvalitera
- Purwanto, Sulistyastuti. 2015. *Implementasi kebijakan publik. Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media
- Sahir, Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodelogi penelitian*. Bojonegoro. KBM Indonesia.
- Sitomorang, Chazali. 2016. *Kebijakan publik*. Depok. CV Khalifah Mediatama. Subarsono. 2015. *Analisis kebijakan publik. Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif, r&d dan kualitatif*. Bandung. Alfa Beta
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar kebijakan publik*. Malang. Intelegensia Media Sore,
- Sobirin. 2017. *Kebijakan publik*. Makassar. CV Sah Media
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Jakarta. PT Indonesia Press
- Tachjan. 2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung. AIPI Bandung Taupiqurrahman. 2014. *Kebijakan publik*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Tjilen, Alexander P. 2019. *Kebijakan publik*. Bandung. Nusa Media Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis kebijakan*. Jakarta. PT Bumi Aksara